

Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Kabupaten Wajo

Umi Kalsum¹, Nurlinah² and Andi Lukman Irwan³

¹ Hasanuddin University, Tamalanrea, Makassar, Indonesia, 90245

² Hasanuddin University, Tamalanrea, Makassar, Indonesia, 90245

³ Hasanuddin University, Tamalanrea, Makassar, Indonesia, 90245

ummiklsmm22@gmail.com

Abstract. Village Sustainable Development Goals (SDGs) is a sustainable development effort that contains eighteen goals that touch all aspects of life including village economic growth. Village-Owned Enterprises (BUMDes) are instruments used to improve economic development and village welfare. This study discusses how the role of BUMDes in achieving the 8th village SDGs goal, namely equitable village economic growth. The purpose of this research is to find out how the implementation and management of BUMDes in achieving Village SDGs and factors that influence the role of BUMDes in achieving the 8th Village SDGs goal in Gilireng District. The type of research used in this study is descriptive qualitative. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, literature studies and documentation studies. The result of this study is that the contribution of BUMDes in increasing Village Original Income (PAD) has not been optimal and BUMDes have not been able to open job opportunities for rural communities. BUMDes in Gilireng District have not been able to encourage the achievement of Village SDGs because they are influenced by several factors, namely the competence of human resources that are still limited and external conditions including economic and political factors that also influence. BUMDes in Gilireng District have the potential and opportunity to become pillars of village economic development. therefore, the role of the relevant government is needed to improve the qualifications of BUMDes managers in Gilireng District

Keywords: BUMDes, Sustainable Development Goals (SDGs), Village SDGs, Village Economy.

1 Pendahuluan

Program pembangunan yang dicanangkan pemerintah saat ini adalah Sustainable Development Goals (SDGs) Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) (Febrica, 2023). Program ini merupakan modifikasi konsep SDGs global dengan 18 tujuan utama untuk menciptakan skema kehidupan berkualitas yang merujuk pada adaptasi lokalitas untuk mempermudah pengukuran hasil, manfaat dan dampak pembangunan. Dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dijelaskan bahwa pembangunan perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan pemberdayaan masyarakat,

keamanan dan ketertiban. Selain itu dijelaskan pula bahwa SDGs Desa merupakan arah kebijakan pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa.

Kehadiran SDGs desa dimaksudkan guna pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta komponen utama untuk memberdayakan masyarakat sehingga membentuk penciptaan kesempatan kerja yang layak (Aerni, 2021; Andreosso-O'Callaghan et al., 2022; Esposito & Dicorato, 2020). Salah satu program pemerintah guna mendorong ketercapaian tujuan SDGs desa adalah dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan strategi kebijakan yang dibentuk pemerintah untuk membangun desa melalui pengembangan ekonomi di desa (Barnes, 2019). BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan sarana pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya. Peningkatan kapasitas ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga desa lewat pengembangan usaha ekonomi (De Schutter & Dedeurwaerdere, 2021).

BUMDes terbentuk dan dimajukan oleh pemerintah desa dan pengelolaannya dikerjakan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat. Berdasarkan data dari website resmi Kementerian Desa PDTT terdapat 47.175 BUMDes dan 4.210 BUMDes, sehingga secara nasional jumlah BUMDes di Indonesia yaitu 51.385 atau 61,3 % dari jumlah desa di Indonesia saat ini yaitu 83.843 desa.

Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah yang menjadikan pembentukan BUMDes di setiap desa sebagai program prioritas. Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) terus melakukan inovasi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan BUMDes di semua desa. BUMDes diharapkan mampu untuk membantu meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli desa (PAD) serta dapat meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini jumlah BUMDes yang tercatat di sistem informasi desa sebanyak 139 BUMDes. Jumlah BUMDes di Kabupaten Wajo mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini dikarenakan kebijakan dari Dinas PMD Kabupaten Wajo yang mendorong desa-desa untuk membentuk BUMDes

agar dapat menjadi pilar perkembangan ekonomi dan kesejahteraan di Desa itu sendiri. saat ini, BUMDes di Kabupaten Wajo telah menjalankan lebih dari 200 jenis usaha, diantaranya, Usaha simpan pinjam, penyewaan alat dan kelengkapan pesta, perdagangan, pertanian, manufacturing, ayam petelur, jasa dan jenis usaha lainnya.

Kecamatan Gilireng merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Wajo Terkait BUMDes sendiri, masing-masing desa di kecamatan Gilireng telah memiliki BUMDes. BUMDes dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung tercapainya beberapa tujuan SDGs Desa, dimana terdapat beberapa tujuan SDGs Desa yang dapat dicapai melalui pengembangan BUMDes, salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi desa merata. Namun, sebagai Instrumen yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan desa, BUMDes di desa-desa yang ada di Kecamatan Gilireng sendiri masih kurang maksimal dalam menjalankan perannya.

Table 1. Jumlah BUMDes di Kecamatan Gilireng.

| No. | BUMDesa | Status | Jenis Usaha |
|-----|-------------|------------------|---|
| 1 | Polewalie | Berkembang | Keuangan(SPP) |
| 2 | Lamata | Berkembang | Penyewaan kursi dan tenda |
| 3 | Arajang | Berkembang | Simpan pinjam, perdagangan |
| 4 | Paselloreng | Berkembang | perdagangan, beras merah |
| 5 | Abbatireng | Berkembang | simpan pinjam jual beli kemasan air minum isi ulang |
| 6 | Alausalo | Berkembang | jual ATK,Depot air isi ulang |
| 7 | Poleonro | Tidak Berkembang | |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo

Dari tabel tersebut dapat dilihat jenis usaha yang dijalankan oleh masing-masing BUMDes di desa-desa yang ada di Kecamatan Gilireng masih minim. minimnya jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes disebabkan oleh kinerja pengelola BUMDes sehingga tidak memiliki inovasi dalam pengembangan BUMDes.

Merujuk pada peran BUMDes yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi di desa melalui pemberdayaan ekonomi desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan desa serta pengelolaan potensi sumber daya alam desa tentunya sulit untuk dicapai jika pengelola BUMDes tidak mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan dari BUMDes itu sendiri. Disamping itu, kesuksesan BUMDes tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan BUMDes tetapi juga terkait dengan permodalan yang digunakan untuk mengoperasikan BUMDes itu sendiri.

Sesuai dengan pandangan Murwadi (2017) bahwa pengelolaan BUMDes memiliki dua kendala yaitu kendala kinerja dan keuangan. Selain itu hambatan kinerja BUMDes adalah pengetahuan masyarakat yang masih terbatas untuk menjalankan bisnis/usaha secara profesional.

Permodalan BUMDes yang diatur dalam undang-undang dapat bersumber dari alokasi dana desa sehingga bergantung pada kebijakan masing-masing desa. Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dijelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membentuk dan mengembangkan BUMDes sehingga pemerintah desa harus mengalokasikan Dana Desa untuk pengelolaan BUMDes.

2 Metode

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Brauner, 2020; Crawford & Abdulai, 2021). Penelitian deskriptif Kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo yang berfokus pada data dari Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie.

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan secara cermat dimana data diseleksi menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban masalah yang diteliti. Pengolahan data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa tujuan ke-8

Dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa yang

dimaksud dengan pembangunan desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Tujuan dari pembangunan desa adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengurasi kesenjangan pembangunan. Salah satu upaya terpadu pemerintah dalam pemeratakan pembangunan desa adalah dengan adanya Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. SDGs Desa memuat 18 tujuan dari seluruh aspek kehidupan yang menjadi acuan dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di desa, termasuk pembangunan ekonomi desa (Barnes, 2019).

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, dana desa diprioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
- b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
- c. Pengembangan Desa wisata.

Adapun penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;

b. Ketahanan pangan nabati dan hewani;

c. Pencegahan dan penurunan stunting;

d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa; meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; perluasan akses layanan Kesehatan

SDGs Desa ke-8 dimaksudkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi desa yang disertai dengan pemerataan hasil pembangunan. SDGs Desa tujuan ke- 8 adalah salah satu tujuan yang dapat dicapai dengan memanfaatkan BUMDes. BUMDes adalah salah satu instrument yang dapat digunakan untuk mendorong pembangunan desa dan berperan dalam menumbuhkembangkan perekonomian desa serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa PAD).

Usaha BUMDes sebagai langkah pendayagunaan berbagai jenis potensi lokal ekonomi desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lewat kegiatan usaha ekonomi desa (Amir Husni et al., 2023; Ansar et al., 2023). Sejalan dengan tujuan SDGs Desa ke-8 yaitu pertumbuhan ekonomi desa merata, BUMDes diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa (PAD) yang dapat mendorong pemerataan pembangunan di desa, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang diharapkan mampu menekan angka pengangguran di desa serta membuka peluang ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial (Akpo et al., 2021; Andreosso-O'Callaghan et al., 2022). Pengembangan kesejahteraan masyarakat desa memerlukan strategi yang sesuai dengan kondisi wilayah yang meliputi semua aspek potensi wilayah atau desa . Adapun yang menjadi dasar hukum dari BUMDes diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong dan pendapatan desa lainnya. Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan

kewenangan skala desa. Pada dasarnya BUMDes ialah bentuk pematapan atau penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan, pemberdayaan ekonomi lokal, yang memiliki berbagai potensi (Valaguzza & Parisi, 2020). Tujuan dibentuknya BUMDes merupakan rangka dalam peningkatan pendapatan asli desa. Karena dari sudut pandang inilah yang mendorong dibentuknya BUMDes oleh setiap pemerintah desa yang ada di setiap daerah

Sumbangsih BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan asli Desa di beberapa desa di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo masih kurang optimal. Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie, hasil masing-masing BUMDes yang menjadi pemasukan desa masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan anggaran/permodalan yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, hal yang menyebabkan kurangnya pemasukan BUMDes ke kas desa disebabkan oleh jumlah unit usaha yang dikelola masih minim serta kurangnya kemampuan pengelola BUMDes dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh BUMDes itu sendiri.

Berikut adalah data Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie selama tiga tahun terakhir.

Table 2. Jumlah BUMDes di Kecamatan Gilireng.

| Nama Desa | Jenis Usaha | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 |
| Desa Paselloreng | Perdagangan, beras merah | - | 940.000,- | 1.000.000,- |
| Desa Lamata | Penyewaan kursi, simpan pinjam | 3.582.500,- | 336.600,- | 577.000,- |
| Desa Polewaie | Simpan pinjam | 2.721.497,- | 1.462.192,- | 3.317.760,- |

Sumber: Buku Laporan BUMDes Paselloreng, BUMDes Lamata dan BUMDes Polewalie

Berdasarkan data tersebut, peran BUMDes sebagai pilar pembangunan ekonomi desa di Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie masih jauh dari kata optimal. Adapun kendala yang dihadapi BUMDes di tiga desa tersebut terletak pada kreatifitas para pengelola BUMDes dalam menjalankan unit usaha serta memanfaatkan modal yang diberikan.

Angka Pendapatan Asli Desa (PAD) yang masih tergolong rendah menjadi tantangan tersendiri untuk pengurus BUMDes dalam mengelola usaha yang dijalankan.

Oleh sebab itu sangat diperlukan adanya peran dari pemerintah daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) maupun pemerintah desa setempat untuk memberikan pelatihan atau pembinaan kepada pengurus BUMDes guna meningkatkan kompetensi dalam hal pengelolaan dan pengembangan BUMDes tersebut.

Membuka Lapangan Pekerjaan

Salah satu upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran adalah dengan pemerataan Pembangunan (Amir Husni et al., 2023; Dana et al., 2022; Irwan et al., 2022; Park, 2019). Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pembangunan dan pengembangan ekonomi di desa, maka pemerintah membentuk suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dimaksudkan menjadi wadah pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. Salah satu tujuan di bentuknya BUMDes yaitu menurunkan angka pengangguran di desa, maka BUMDes diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang ada di desa. Mayoritas penduduk di Kecamatan Gilireng khususnya desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie bekerja sebagai petani, baik itu petani dengan lahan sendiri maupun buruh tani. Hingga saat ini masih belum terdapat lapangan pekerjaan baru yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada di desa. Pada dasarnya

BUMDes sangat berpotensi dalam membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, namun hal ini bergantung pada pengelolaan modal dan unit usaha. Semakin besar penyertaan modal BUMDes dan semakin banyak unit usaha yang dijalankan, maka semakin banyak peluang penyerapan tenaga kerja. Namun, BUMDes di Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie, jumlah unit usaha yang jalankan oleh masing-masing BUMDes masih sangat minim. BUMDes di desa tersebut hanya mengoperasikan satu sampai dua unit usaha sehingga pengelolaannya belum bisa menyerap tenaga kerja. Selain itu, minimnya pemahaman terkait sistem kerja dan pemberian upah pada pegawai BUMDes juga menjadi penyebab kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes.

Table 3. Jumlah BUMDes di Kecamatan Gilireng.

| Nama BUMDesa | Pengelola |
|---------------------|----------------|
| BUMDesa Paselloreng | Satria hidayah |

| | |
|------------------|--|
| BUMDesa Lamata | Andi Alfiah Huridamayanti H. Mahyudin Junaedah,S.Pd Nurmilasari Andi Devi Tamalasari, S.Pd H. Meri |
| BUMDesa Polewaie | Sundari, SE Nurul Amelia Firman, S.Pd Monika |

Sumber: Buku Laporan BUMDes Paselloreng, BUMDes Lamata dan BUMDes Polewalie

Kurang optimalnya peran BUMDes dalam menyerap tenaga kerja harus menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak. Pengurus BUMDes harus mampu mengembangkan unit usaha yang dijalankan. Selain itu, intervensi dari kepala desa selaku penasehat serta BPD selaku pengawas BUMDes juga sangat diperlukan untuk mengawal peran BUMDes sebagai badan penyedia lapangan kerja di desa.

Membuka Peluang Ekonomi Desa

Pendirian BUMDes bukan semata-mata mencari keuntungan ekonomis atau laba, tapi juga manfaat sosial dan nonekonomi lainnya (Chrysostome, 2019; Mauro & Pernazza, 2023; Zeigermann, 2020). Pemdes dapat mendirikan BUMDes, sesuai kebutuhan dan potensi desa. Selain berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan membuka lapangan pekerjaan, BUMDes juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Peran BUMDes dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes terkait.

BUMDes yang dijalankan di Desa Lamata dan Desa Polewalie sudah cukup berpengaruh dalam membuka peluang ekonomi di desa tersebut. Melalui jenis usaha simpan pinjam BUMDes yang dapat menjadi pemberi modal bagi masyarakat setempat untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha mereka. Jenis usaha simpan pinjam adalah jenis usaha yang paling banyak dijalankan oleh pengelola BUMDes tidak hanya di Kecamatan Gilireng tetapi juga di Kabupaten Wajo. jenis usaha ini diharapkan

mampu membebaskan masyarakat dari rentenir atau lintah darat yang memberikan bunga tinggi sehingga banyak masyarakat yang terjatuh hutang.

Keberhasilan unit usaha simpan pinjam tidak diikuti oleh jenis usaha lain. Desa Paselloreng yang menjalankan unit usaha beras merah belum mampu memberi kontribusi bagi masyarakat, meskipun demikian, disampaikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wajo Bapak H.Syamsu Alam,S.Sos bahwa usaha beras merah di paselloreng memiliki potensi serta peluang besar untuk membantu perekonomian desa. Pengelola BUMDes Paselloreng dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk pemasaran. Namun, hal tersebut tidak dilakukan karena pengelola BUMDes paselloreng masih belum mampu memproduksi beras merah dalam jumlah banyak.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran BUMDes dalam pencapaian SDGs Desa di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo, maka diperoleh kesimpulan bahwa peran BUMDes dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Kecamatan Gilireng (Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie)

- Peran dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) sudah berjalan, namun masih sangat minim. Hal ini terjadi karena kurangnya kemampuan pengelola BUMDes dalam mengembangkan jenis usaha yang ada serta memanfaatkan modal yang diberikan.

- Peran dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat masih belum maksimal, BUMDes di Desa Paselloreng, Desa Lamata dan Desa Polewalie masih belum mampu menyerap tenaga kerja karena masih kurangnya jenis usaha yang dijalankan serta minimnya minat masyarakat desa untuk menjadi pengelola BUMDes.

- Peran dalam Membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sudah berjalan melalui usaha simpan pinjam yang dijalankan, namun masih perlu untuk di tingkatkan.

References

Aerni, P. (2021). Decentralized Economic Complexity in Switzerland and Its Contribution to Inclusive and Sustainable Change. *Sustainability*, 13(8), 4181. <https://doi.org/10.3390/su13084181>

- Akpo, E., Ojiewo, C. O., Kapran, I., Omoigui, L. O., Diama, A., & Varshney, R. K. (2021). Enhancing Smallholder Farmers' Access to Seed of Improved Legume Varieties Through Multi-stakeholder Platforms, Learning from the TLIII project Experiences in sub-Saharan Africa and South Asia. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-8014-7>
- Amir Husni, A. H. A., Rusli, A. M., Syamsu, S., & Ansar, M. C. (2023). Upah Minimum dan Tingkat Kemiskinan: Studi Kebijakan di Indonesia. *Jurnal Administrasi Negara*, 29(3), 275–298. <https://doi.org/10.33509/jan.v29i3.2687>
- Andreosso-O'Callaghan, B., Rey, S., & Taylor, R. (2022). Sustainable Development in Asia, Socio-economic, Financial, and Economic Perspectives. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-94679-1>
- Ansar, M. C., Tsusaka, T. W., Nitivattananon, V., & Rusli, A. M. (2023). Social Sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises: The Case of Makassar City, Indonesia. Preprint, Research Square, 1(1), 1–15.
- Barnes, M.-M. (2019). State-Owned Entities as Key Actors in the Promotion and Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development: Examples of Good Practices. *Laws*, 8(2), 10. <https://doi.org/10.3390/laws8020010>
- Brauner, Y. (2020). Research Handbook on International Taxation. <https://doi.org/10.4337/9781788975377>
- Chrysostome, E. (2019). Capacity Building in Developing and Emerging Countries, From Mindset Transformation to Promoting Entrepreneurship and Diaspora Involvement. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-16740-0>
- Crawford, G., & Abdulai, A.-G. (2021). Research Handbook on Democracy and Development. <https://doi.org/10.4337/9781788112659>
- Dana, L.-P., Keen, C., & Ramadani, V. (2022). Entrepreneurship in South America, Context, Diversity, Constraints, Opportunities and Prospects. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-97060-4>
- De Schutter, O., & Dedeurwaerdere, T. (2021). Social Innovation in the Service of Social and Ecological Transformation, The Rise of the Enabling State. <https://doi.org/10.4324/9781003223542>
- Esposito, P., & Dicorato, S. L. (2020). Sustainable Development, Governance and Performance Measurement in Public Private Partnerships (PPPs): A Methodological Proposal. *Sustainability*, 12(14), 5696. <https://doi.org/10.3390/su12145696>
- Febrica, S. (2023). Indonesia and the Indo-Pacific. <https://doi.org/10.4324/9781003395317>
- Irwan, A. L., Haryanto, H., & Ansar, M. C. (2022). A Study of Prospective Local Own-Source Revenues in Central Mamuju, Indonesia. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 78–94. <https://doi.org/10.26618/ojip.v12i2.7271>
- Mauro, M. R., & Pernazza, F. (2023). State and Enterprise, Legal Issues in the Global Market. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-10473-2>
- Park, J.-D. (2019). Re-Inventing Africa's Development, Linking Africa to the Korean Development Model. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-03946-2>
- Valaguzza, S., & Parisi, E. (2020). Public Private Partnerships. <https://doi.org/10.4337/9781789903737>
- Zeigermann, U. (2020). Transnational Policy Entrepreneurs, Bureaucratic Influence and Knowledge Circulation in Global Cooperation. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-44893-6>